

Outlook Pemberantasan Korupsi 2024

“Muslihat Politik & Pemberantasan Korupsi”

Indonesia Corruption Watch

Struktur Paparan Outlook Pemberantasan Korupsi

01

Potensi
Runtuhnya
Kredibilitas
Pemilu

02

Transaksi
Janggal Dana
Kampanye

03

Jalan Terjal
Agenda
Pemberantasan
Korupsi

04

Melencengnya
Kebijakan
Negara

Potensi Runtuhnya Kredibilitas dan Indikasi Politik “Cawe-Cawe” Presiden Jokowi pada Pemilu 2024

- Pemilu dan Pilkada 2024: subur konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara
 - Diperparah pernyataan dan gelagat keberpihakan Presiden Jokowi, khususnya pada Pilpres 2024
 - Putusan MK 68/PUU-XX/2022 dan PP No. 53 Tahun 2023: Menteri dan Kepala Daerah menjadi capres/cawapres tidak harus mundur, tapi
 - Tidak ada upaya pemerintah menguatkan instrumen penanganan konflik kepentingan dan pencegahan pembajakan fasilitas negara untuk kampanye
 - Dampak:
 - Politisasi anggaran/ program pemerintah, aparatur negara, fasilitas negara
 - Berdampak pada panggung kontestasi pemilu yang tidak adil dan setara

Ketidakseriusan Tangani Transaksi Janggal Dana Kampanye dan Politik Uang

- Adanya dugaan transaksi mencurigakan dari aktivitas tambang ilegal dan pelbagai aktivitas kejahatan lingkungan untuk kegiatan Pemilu 2024.
- Masing-masing paslon didukung oleh pebisnis terutama pebisnis lingkungan.
- Pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh Rosan Roeslani dan Aburizal Bakrie, yang terafiliasi dengan grup bisnis BUMI, dan Pandu Sjahrir yang terafiliasi dengan grup bisnis batubara TOBA.
- pasangan Anies-Muhaimin didukung oleh Thomas Lembong, yang terafiliasi dengan Quvat Management, dan Ahmad Ali, pebisnis nikel sekaligus Wakil Ketua Umum Nasdem.
- Ganjar-Mahfud antara lain didukung oleh Arsjad Rasjid, yang terafiliasi dengan bisnis batubara melalui grup INDY, sekaligus ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Dukungan pebisnis terutama pebisnis lingkungan terjadi dari pemilu ke pemilu.
- Penyalagunaan bantuan sosial menjelang kampanye.

Ketidakseriusan Tangani Transaksi Janggal Dana Kampanye dan Politik Uang

- Kerawanan penyalahgunaan tersebut juga semakin menguat tatkala sejumlah menteri, kepala daerah, dan pejabat tinggi lain terlibat sebagai tim kampanye atau secara terbuka mendukung capres tertentu, termasuk juga maju sebagai caleg.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada pertengahan Januari 2024 membagikan bantuan sembako untuk masyarakat di Lombok Tengah, NTB dan berulang kali menyampaikan kepada mereka untuk terima kasih kepada Presiden Jokowi.
- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan penyaluran bantuan pemerintah. Keduanya merupakan Ketum Parpol dan tergabung dalam tim pemenangan Prabowo - Gibran.
- Pasal 304 dan Pasal 282 UU Pemilu menjelaskan ada larangan bagi pejabat negara menyalahgunakan sumber daya dan fasilitas negara, termasuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan peserta pemilu.
- 2024 anggaran bansos pemerintah naik Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 157,3 triliun.
- Tahun 2024, setidaknya pemerintah menjadwalkan distribusi untuk empat bantuan. Mulai dari bansos beras 10 kilogram, bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk bantuan PKH dan BPNT, paling tidak akan dibagikan dalam empat tahap. Tahap I dimulai Januari – Maret, tahap II April – Juni, tahap III Juli – September, dan tahap IV Oktober – Desember.

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Merosotnya IPK Indonesia

- Penundaan penindakan terhadap peserta Pemilu menjadi pemantik terjadinya stagnasi dalam penegakan hukum
- Pemulihan kerugian keuangan negara sebaiknya menjadi fokus aparat penegak hukum
- Pembenahan KPK, khususnya dalam aspek pengawasan internal serta perbaikan penanganan perkara
- Hilir penegakan hukum, seperti vonis pengadilan dan menjalani masa pemidanaan masih menjadi permasalahan yang akan muncul

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

KPK dalam Cengkaraman Hegemoni Kekuasaan

- Peran Presiden dalam menentukan pengganti Firli dan persiapan pergantian struktur Pimpinan KPK menarik untuk disorot
- Pengembalian tanggungjawab pengelolaan kelembagaan pada Presiden pasca carut-marut yang terjadi sepanjang tahun 2023

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

Komitmen Semu RUU Perampasan Aset

- Peran Presiden dalam menentukan pengganti Firli dan persiapan pergantian struktur Pimpinan KPK menarik untuk disorot
- Pengembalian tanggungjawab pengelolaan kelembagaan pada Presiden pasca carut-marut yang terjadi sepanjang tahun 2023

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

RUU PBJ Jalan di Tempat

- Pembahasan RUU PBJ di DPR akan menjadi pertarungan kredibilitas dan independensi lembaga legislatif, mengingat muatan regulasi ini akan memperketat pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Isu utamanya, mayoritas anggota DPR diisi oleh pebisnis.
- Urgensi perluasan subjek agar juga mencakup pengadaan di lingkup legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD menjadi satu isu yang diangkat dalam rancangan UU PBJ
- Maraknya korupsi di sektor PBJ, di mana kerugian negara mencapai Rp 37,5 triliun, mestinya menggerakkan pembentuk UU segera merampungkan proses legislasi

Jalan Terjal Agenda Pemberantasan Korupsi

Setengah Hati Reformasi Kepolisian

- Pasal 10 ayat (1) TAP MPR tentang Peran TNI-Polri menyangkut netralitas aparat pada Pemilu mendatang perlu diperhatikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
- Transparansi kepolisian berkaca dari ketertutupan dalam pengadaan gas air mata diyakini masih akan terjadi pada tahun 2024
- Peran Presiden selaku atasan administratif Kapolri dinantikan untuk merealisasikan agenda reformasi kepolisian

**Arah Kebijakan Negara Semakin Jauh dari Koridor
Demokrasi dan Konstitusi**

Pelanggaran Intimidasi dan Represifitas untuk Persempit Ruang Sipil

- Pemerintah dan pendukungnya masih memosisikan kritik sebagai serangan terhadap personal.
- Substansi kritik tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
- Buruknya kinerja penegak hukum dalam menindaklanjuti intimidasi.
- Penggunaan kekerasan terhadap warga saat menyampaikan kritik, salah satunya menggunakan gas air mata.

Produk Legislasi Bermasalah

- Gagalnya pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam menyusun regulasi.
- Penyusunan regulasi yang memprioritaskan kepentingan politik di atas kepentingan umum, seperti UU MK dan RUU DKJ.

Manuver Pembangunan Tanpa Keadilan atas nama Proyek Strategis Nasional

- Lebarinya ruang diskresi atas nama investasi dan pembangunan yang mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan.
- 4 kasus dugaan korupsi terkait Proyek Strategis Nasional medio 2022-2023 dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun.
 - Bendungan Paselloreng
 - Bendungan Tapin
 - Jalan Tol Jakarta-Cikampek
 - Jalur Kereta Api Trans Sulawesi

Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral dan Partisipasi Masyarakat

- Narasi perpanjangan masa jabatan oleh beberapa menteri melalui amandemen konstitusi dan penundaan pemilu.
- Prioritas yang menciderai demokrasi dengan cara memperpanjang kekuasaan elit lokal di tingkat desa dibanding menyelesaikan persoalan korupsi di Desa.
- Ketertutupan pemerintah dalam menunjuk pejabat tanpa dasar hukum dan memiliki tendensi untuk mengakomodir kepentingan pusat.

Terima kasih